

Fungsi Politik Ruang Publik Pada Masa Orde Baru, Reformasi, Hingga Era Digital

Embu Henriques dan Andina Dwifatma¹

Abstract:

The ideal society according to Jürgen Habermas is no longer classless society as idealized by Karl Marx, but a society in which each member could freely talk about their ideas regarding public life, without the fear of being repressed by certain parties. For Habermas, the class struggle is not merely about opposition, but begun by identification instead. This is the root of all Habermas' ideas of public sphere. This paper will discuss the concept of public sphere in Indonesia, from the New Order era, to Reformation, and finally the digital age.

Key words: public sphere, communication, media, internet

Interact, Vol. 4, No. 1, Mei, 2015,
Hal. 1-10, Prodi Komunikasi,
Unika Atma Jaya Jakarta.

¹ Penulis adalah pengajar pada Program Studi Ilmu Komunikasi di Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, yang dapat dihubungi di embu.hrq@atmajaya.ac.id dan/atau andina.dwifatma@atmajaya.ac.id,

PENDAHULUAN

Sepanjang perjalanan perkembangan pemikirannya, Habermas konsisten menempatkan komunikasi sebagai faktor kunci dalam kehidupan masyarakat, termasuk ketika ia membicarakan rasionalitas masyarakat. Seorang individu dikatakan rasional apabila ia mampu menyadari situasinya dan mencari pemecahan dari setiap permasalahan yang ia hadapi. Demikian pula masyarakat dikatakan rasional apabila mampu menemukan jalan keluar dalam setiap permasalahan yang dihadapi bersama.

Tetapi, bagaimana cara memperoleh jalan keluar yang disepakati bersama oleh masyarakat? Kata Habermas, kuncinya adalah dialog yang dilakukan melalui ruang-ruang publik. Definisi ruang publik menurut Habermas adalah suatu ruang tempat individu-individu berkumpul demi membahas kepentingan bersama, tanpa dibebani oleh kepentingan masing-masing, untuk menemukan suatu konsensus universal demi kebaikan orang banyak.

Dalam karyanya *The Structural Transformation of the Public Sphere*, Habermas memaparkan bahwa dulu—persisnya di penghujung abad 18 dan 19—terdapat berbagai ruang publik borjuis. Disebut demikian karena yang berpartisipasi di dalamnya adalah para borjuis; arena yang disebut ruang publik adalah surat kabar, jurnal, parlemen, klub politik, salon sastra, dan kafe. Tapi di sinilah warga berdiskusi, membicarakan kepentingan bersama, dan menghasilkan “nalar publik” sebagai pengawas terhadap kekuasaan negara. Tapi pada abad ke-20, terjadi kemerosotan ruang publik borjuis, sekurang-kurangnya oleh dua hal, yakni kekuasaan negara yang mengarah pada absolutisme, dan industri budaya yang mau mengubah segalanya menjadi komoditas.

Habermas ingin mengembalikan ruang publik ke fungsinya seperti ruang publik borjuis era abad 18 dan 19. Ruang publik seperti itu mengandaikan adanya situasi bicara ideal (*ideal speech situation*) di mana setiap partisipan dalam ruang publik dapat mengemukakan pendapatnya masing-masing tanpa ditekan oleh pihak-pihak tertentu. Ada kesetaraan antara partisipan, dan nantinya pendapat yang menang adalah yang argumentasinya paling kuat dan paling bermanfaat untuk kepentingan bersama. Teori ruang publik kemudian menjadi kekhasan teoretis dalam

pemikiran Habermas. Dalam artikel ini, kedua penulis berupaya menelaah perkembangan ruang publik di Indonesia dari masa ke masa, yakni zaman Orde Baru, Reformasi, dan era digital.

Habermas adalah filsuf dan sosiolog Jerman yang terkenal sebagai generasi kedua Mazhab Frankfurt. Dia lahir 18 Juni 1929 di Düsseldorf, dari keluarga kelas menengah tradisional. Habermas menamatkan kuliahnya di Göttingen, Zürich, dan Bonn. Di universitas yang terakhir ini, ia memperoleh gelar doktor dengan mempertahankan disertasi mengenai pemikiran filsuf Jerman, Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, pada tahun 1954. Habermas lalu pindah ke University of Marburg di bawah bimbingan Wolfgang Abendroth, seorang Marxis. Karya ini diterbitkan pada tahun 1989 dalam bahasa Inggris dengan judul *The Structural Transformation of the Public Sphere: an Inquiry into a Category of Bourgeois Society*. Tahun 1971, Habermas menjabat sebagai direktur Max Planck Institute for the Study of the Scientific-Technical World di Starnberg, dekat Munich, sampai tahun 1983. Pada masa ini pula ia menulis *magnum opus* *The Theory of Communicative Action*. Habermas lalu kembali ke Frankfurt dan bekerja di sana sampai pensiun tahun 1993.

Pengertian Publik dan Ruang Publik

Menurut Habermas, penggunaan kata *publik* dan *ruang publik* menunjukkan adanya kemiripan makna antara keduanya. Makna kata publik itu berbeda sewaktu kata itu digunakan. Ketika kita menyebut *bangunan publik*, tentu maksudnya bukan bangunan untuk boleh dimasuki semua orang, karena kata publik disini terkait dengan milik negara. Sebaliknya, kalau menyebut istilah *pejabat publik* maka kita mengacu pada seseorang yang memiliki otoritas atau tugas untuk mengurus kepentingan banyak orang. Lain lagi kalau kita menggunakan kata *sambutan publik* kepada seseorang sehabis berpidato, maka yang kita maksud dengan kata tersebut adalah pengakuan atau penerimaan dari publik atas pidatonya. Kata publik itu juga dilawankan dengan kata privat. Istilah privat itu menunjuk pada manusia kebanyakan, tanpa jabatan dan tanpa hak khusus untuk memerintah.

Namun kata publik, dalam kaitan dengan opini publik, dalam konteks ini sebetulnya sebagai suatu bentuk perlawanan terhadap

Politische Oeffentlichkeit/ Ruang publik politik	Literarische Oeffentlichkeit Ruang publik sastra	Repraesentative Oeffentlichkeit/ Perwakilan publik
Topik pembicaraan tentang berbagai hal menyangkut politik. Isinya kritik dan pandangan tentang pemerintah, parlemen dan berbagai hal menyangkut kepentingan dan kesejahteraan masyarakat luas. Tempat pertemuannya di luar istana, yaitu di kedai kopi (Inggris, Jerman), dan di salon-salon (Perancis). Pesertanya adalah para borjuis yang tidak mempunyai kedudukan, tetapi terdidik, dan masyarakat umum yang berminat. Tidak ada stratifikasi sosial.	Topiknya adalah mengenai sastra dalam pengeretian yang luas. Ada kritik dan juga tanggapan atas berbagai pendapat dalam tulisan-tulisan. Tempatnya juga di luar istana, yaitu di tempat-tempat bacaan, perpustakaan, dst. Pesertanya adalah para intelektual, para borjuis yang tidak mempunyai kedudukan, tetapi orang-orang terdidik, para kelompok baca, pers, dst. Tidak ada perbedaan berdasarkan stratifikasi sosial.	Ini adalah ruang publik karena mengambil tempat di istana. Istana adalah simbol yang menunjukkan otoritas raja. Raja adalah pejabat publik tertinggi, yang menjadi representasi dari seluruh rakyatnya. Ini adalah ruang publik dalam arti khusus, sebagai tempat pesta, tempat pameran kehormatan, dan keagungan. Isinya adalah para bangsawan. Strata sosial tampak jelas. Ada perbedaan antara bangsawan tinggi, dan bangsawan rendah.

otoritas atau kekuasaan (Habermas, 2001: 2).

Sedangkan kata ruang atau *sphere* menurut Habermas sebetulnya berakar dalam kata Yunani yang sampai kepada kita melalui orang-orang Romawi kuno. Ruang dalam pengertian polis Yunani, ada dua yaitu *koine*, yang terbuka bagi setiap warga negara, yang dibedakan dari *oikos*, tempat setiap individu berada di dalamnya. Kehidupan publik (*bios politikos*) berlangsung di tempat-tempat umum seperti pasar (*agora*). Sedangkan ruang publik adalah ruang atau tempat orang-orang bisa berdiskusi (*lexis*), atau duduk berkonsultasi atau duduk di pengadilan dan bahkan dimana orang bisa melakukan tindakan-tindakan bersama (*praxis*) seperti dalam medan perang atau medan pertandingan atletik (Habermas, 2001: 3-4).

Institusi Ruang Publik

Sebelum lebih jauh membahas tentang institusi ruang publik, perlu dipahami dulu bahwa yang menjadi fokus dari pembahasan tentang ruang publik oleh Habermas adalah ruang publik kaum borjuis. Ruang publik ini juga terbuka bagi semua orang, tanpa

ada perbedaan strata sosial. Habermas membedakan tiga kategori ruang publik sesuai titik tolak pada topik pembicaraannya.

Dari tiga kategori di atas, kita boleh mengatakan bahwa sesungguhnya yang dimaksud Habermas dengan ruang publik adalah ruang publik politik (*politische oeffentlichkeit*); bukan ruang publik sastra, karena di dalam ruang publik sastra yang menjadi obyek pembicaraan adalah sastra dan bukan sesuatu yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Habermas juga tentu tidak mengacu pada ruang publik istana sebagai ruang publik yang ia maksudkan, karena istana adalah milik raja, simbol otoritas. Ruang publik yang dimaksud adalah sebuah wilayah sosial dimana warga negara dapat terlibat dalam deliberasi dialogal, dan opini publik dapat terbentuk (M. Sastrapatedja dalam F. Budi Hardiman (2010), halaman 269-270). Hal demikian tentu bertentangan dengan istana.

Habermas juga membuat perbedaan atau pemisahan antara bidang atau ruang privat dengan bidang atau ruang publik. Dengan perbedaan antara yang privat dan yang publik kita diharapkan sedikit memahami posisi atau

(Habermas, *The Structural Transformation of the Public Sphere*, 2001: 30)

Wilayah/ruang privat	Ruang Publik	Ruang Publik dalam kaitan dengan otoritas istana
<p>Wilayah masyarakat sipil sebagai tempat pertukaran komoditas dan kerja</p> <p>Ruang internal untuk keluarga konyugal (dari para borjuis intelektual)</p>	<p>Ruang publik untuk bidang politik</p> <p>Ruang publik untuk bidang sastra (termasuk musik dan teater)</p> <p>Pasar untuk produk-produk budaya, di kota.</p>	<p>Negara (bidang yang terkait dengan kebijakan)</p> <p>Istana (wilayah yang ditandai dengan tata krama dan sopan-santun)</p>

letak dari apa yang dia maksudkan dengan ruang publik.

Istana adalah tempat pertemuan dan sekaligus pusat berbagai kegiatan dengan sang raja yang menjadi simbolnya. Para seniman, para penulis, dan ilmuwan berkumpul untuk berdiskusi bersama kaum bangsawan dan borjuis tentang seni dan sastra dan juga politik. Di Perancis, pada masa pemerintahan raja Philips dari Orleans, istana yang berada di Versailles dipindahkan ke kota Paris. Pada saat itulah status ruang publik istana bergeser ke kota. Kota menjadi pusat yang mengembangkan fungsi-fungsi sosial dan budaya (seni dan sastra). Ruang publik sebagai tempat pertemuan lalu berpindah dari istana ke salon-salon di pusat kota Paris (Habermas, 2001: 31-32).

Pertumbuhan ruang publik yang baru juga terjadi di Inggris pada abad ke-18. Jika di Perancis dikenal dengan salon sebagai tempat-tempat pertemuan, maka yang terjadi di Inggris adalah kedai kopi. Suguhan yang disajikan pada saat-saat pertemuan semacam itu tidak hanya teh, tetapi juga cokelat dan kopi. Pada saat itu jumlah kedai kopi di Inggris mencapai angka tiga ribu kedai kopi. Ruang publik berupa kedai kopi ini, sebagai tempat minum kopi sambil berdiskusi, dapat dimasuki oleh orang dari berbagai kalangan dan dari berbagai strata sosial yang berbeda. Yang tidak boleh hanyalah kaum perempuan (Habermas, 2001: 34).

Sementara itu, di Jerman tidak ada kota yang dapat menggantikan representasi

dan publisitasi istana sebagai ruang publik. Namun menurut Habermas, ada beberapa unsur yang mirip dengan salon dan kedai kopi yang disebut dengan *himpunan masyarakat meja* (*Tischgesellschaften*), dan *himpunan masyarakat sastra* (*Sprachgesellschaften*) pada masa sekitar abad ke-17 (Habermas, 2001: 34).

Ruang-ruang publik yang berada di tiga negara berbeda ini sebetulnya terbangun dan terbentuk dari ruang-ruang privat. Ada tiga kesamaan yang menandai ruang-ruang publik ini (Habermas, 2001: 36-37) : *Pertama*, para peserta yang biasa mendatangi ruang publik ini mempertahankan sebuah bentuk hubungan sosial yang menekankan pada kesetaraan. Sesuatu yang berbeda dengan bentuk hubungan dalam istana. Persamaan dan kesetaraan itulah yang menjadi landasan untuk melawan pola hubungan yang berdasarkan kedudukan dan hirarki sosial.

Kedua, pertemuan dalam acara diskusi di ruang publik itu selalu mengandaikan dan mengindikasikan adanya persoalan yang menjadi keprihatinan dan kepedulian umum yang selama ini selalu disimpan dan dikurung di dalam wilayah otoritas negara, gereja, dan istana. Ruang publik ini, yang umumnya terdiri dari kumpulan masyarakat privat, yaitu kaum borjuis dan masyarakat dari berbagai kalangan, menjadi tempat untuk saling berbagi dan sekaligus mengkomunikasikan dan menentukan sendiri maknanya, jadi tidak terikat lagi pada makna yang ditentukan otoritas.

Ketiga, dalam proses diskusi di ruang

publik ini, kebudayaan berubah menjadi komoditas, dan dengan begitu bisa menjadi obyek untuk didiskusikan. Pertemuan-pertemuan semacam ini membangun sebuah publik yang inklusif. Isu-isu yang dibahas menjadi hal yang umum, diketahui banyak orang, karena mudah diakses dan dapat memungkinkan orang lain untuk ikut berpartisipasi. Publik, dengan demikian, membangun dirinya secara institusional sebagai sebuah kelompok diskusi. Mereka berpotensi sebagai lembaga pewarta, karena hal-hal yang didiskusikan, sekalipun bersifat internal, tetapi dapat disebarkan ke luar, ke kalangan yang lebih luas.

Meskipun ruang publik borjuis memiliki nuansa dialog yang berbeda-beda, menurut Habermas ada tiga kriteria umum yang berlaku di dalamnya.

Pertama, ada kesetaraan antara partisipan. Status sosial bukan berarti tidak ada atau tidak disadari, tetapi bisa dilampaui. Artinya, dalam dialog semua orang duduk bersama dengan status yang sama, yaitu warga negara. Kepentingan ekonomi dan kekuasaan juga perlu dilampaui. *Kedua*, yang dibicarakan dalam dialog haruslah masalah-masalah yang menyangkut kepentingan bersama. Artinya, jikapun terjadi dialog tapi yang dibicarakan urusan privat orang lain, ruang publik tidak terwujud. *Ketiga*, sifat ruang publik haruslah inklusif, artinya semua orang dapat bergabung dan mengungkapkan pemikirannya.

Situasi bicara ideal dikembangkan Habermas dari teori *speech-act* yang dikemukakan J.L. Austin (1911-1960). Menurut Austin, ujaran adalah selalu merupakan bentuk tindakan. Aspek ini, misalnya, tampak pada ucapan “saya berjanji besok akan datang” atau “saya nyatakan kelas ini berakhir”. Habermas kemudian menyusun empat klaim komunikasi, yaitu (1) harus *jelas*, artinya orang harus dapat mengungkapkan dengan tepat apa yang dimaksud; (2) harus *benar*, artinya mengungkapkan apa yang mau diungkapkan; (3) harus *jujur*, artinya tidak boleh bohong; (4) harus *betul*, artinya sesuai norma-norma yang diandaikan bersama (Magnis-Suseno, 2005).

Fungsi politis ruang publik

Di Inggris, menurut Habermas, salah satu faktor yang menandai perkembangan ruang

publik di wilayah politik adalah penghapusan sensor terhadap media (Habermas, 2001:58). Penghapusan ini menandakan tahap baru dalam perkembangan ruang publik. Apa yang dibahas dalam ruang publik akan dapat masuk ke dalam pers. Kritik dan argumen-argumen rasional menjadi lebih berkembang. Keputusan-keputusan politik dapat dibawa ke forum publik melalui pembicaraan di ruang publik dan dalam pers. Penghapusan lembaga sensor terhadap pers menyebabkan ruang kebebasan pers menjadi lebih besar dan kritik menjadi hal yang bisa terjadi secara lebih terbuka. Ruang kebebasan untuk menyatakan pendapat dan mengkritik menjadi ciri dalam sebuah kehidupan politik yang demokratis. Pertumbuhan pers menjadi semakin bertambah atau meningkat jumlahnya.

Habermas menyebutkan ada sejumlah media yang muncul terkait dengan pembicaraan menyangkut persoalan seputar politik. Ada jurnal *Gulliver*, *Dunciad*, dan *Fables*. Menyusul ketiga jurnal ini adalah *Gentleman's Magazine* yang dinilai sebagai paling kritis dan paling aktif terlibat dalam perdebatan sekitar soal politik. Kemudian *Lettres of Junius*, yang terbit sejak November 1768 dalam *Public Advertiser* merupakan kolom yang berisi artikel-artikel politik yang berbobot. Setelah *Gentleman's Magazine* muncul saingan barunya yaitu *London Magazine*. Lalu ada juga koran *Morning Chronicle*, dengan kolomnya *memory* memuat semua isi pidato Parlemen, hal yang sebelumnya dianggap tabu dan dilarang.

Suasana ini mencerminkan sebuah kesadaran dan perhatian yang semakin besar kepada kepentingan rakyat banyak. Ungkapan seperti *perasaan rakyat*, *suara bersama*, *tuntutan umum rakyat*, menjadi kata-kata kunci dalam perbincangan politik di ruang publik (Habermas, 2001: 60-64).

Di Perancis, keadaannya sedikit berbeda dengan di Inggris dalam kaitan dengan pers dan ruang publik sebagai wadah untuk pembicaraan isu-isu politik. Sebelum revolusi, publik di Perancis belum dapat mengungkapkan pikiran-pikiran kritisnya secara efektif karena ada sensor. Jurnal yang memuat isu-isu politik belum ada. Kaum borjuis yang terdiri dari para bankir, pedagang, saudagar besar, para petani pemilik tanah tidak bisa kompak dan bersatu dengan

para bangsawan dan pejabat pemerintah yang lebih tinggi seperti di Inggris. Perbedaan kelas di antara mereka terlalu besar.

Pada paruh pertama abad ke-18, muncul kritik seputar agama, sastra, dan seni dari kalangan para filsuf, kecuali Montesquieu. Dalam perkembangan kemudian, muncullah berbagai club yang juga ikut mempromosikan ide serta gagasan mereka dalam jurnal-jurnal seperti *Gazette et du Commerce* dan *Journal de l'Agriculture, du Commerce et des Finances*. Dua orang editor dari jurnal-jurnal ini dianggap sebagai pelopor dalam opini publik, yaitu: Turgot dan Malesherbes.

Namun Necker adalah orang yang pertama berhasil dan berani membuka sistem absolutis untuk uang publik dalam wilayah perbincangan politik ketika ia mempublikasi ketidakberesan neraca anggaran belanja negara. Inilah awal dimulainya perdebatan isu-isu politik di ruang publik. (Habermas, 2001: 68-69)

Namun dalam catatan sejarah Perancis, ruang publik yang membahas isu-isu politik ini ternyata pernah terhenti karena pembredelan terhadap pers oleh Napoleon pada 17 Januari 1800. Dari tahun 1811 sampai seterusnya, Napoleon hanya membolehkan tiga surat kabar milik pemerintah untuk terbit dan itu pun tetap disensor (Habermas, 2001: 71).

Jerman berbeda dengan Inggris dalam soal keningratan. Ada perbedaan tajam antara kelompok borjuis yang ningrat dengan masyarakat biasa seperti petani buruh atau petani penyewa, pedagang, seniman, penjaga toko. Namun jika dibandingkan dengan Perancis, kondisi di Jerman lebih baik. Setidak-tidaknya banyak jurnal tentang politik yang terbit di Jerman dibandingkan dengan di Perancis pada masa sekitar abad ke-18. Juga tidak ada sensor terhadap pers seperti yang terjadi di Perancis. Suasana dan struktur masyarakat seperti ini sedikit banyak akan mewarnai model ruang publik yang kita bicarakan. Jika feodalisme dan warna keningratan begitu kuat, maka ruang publik sebagai tempat diskusi akan tidak terlalu tumbuh dan berkembang baik. Yang seperti ini tampak menonjol di Perancis. Sementara di Jerman, kelompok-kelompok masyarakat bawah tidak lagi mengandalkan pada gelar kebangsawanan dan keningratan, tetapi pada pendidikan. Mereka ini bisa masuk ke dalam

sebuah kelas borjuasi baru yang bisa diterima.

Hal penting sebagaimana sudah disebutkan adalah faktor banyaknya jurnal yang membahas dan mendiskusikan isu-isu politik, juga aspek kebebasan dalam berpikir dan mengkritisi. Ini adalah hal krusial dalam pertumbuhan dan perkembangan ruang publik. Ada sejumlah jurnal yang di Jerman yang disebut Habermas sebagai jurnal yang membahas politik: *Staatsanzeigen*, *Teutscher Merkur*, *Minerva*, *Hamburger Politische Journal*, *Journal von und fuer Deutschland*, *Schloer*, *Felleisen*, dan *Deutsche Chronik*. Pendiri dari kedua jurnal yang disebut terakhir mengalami peristiwa tragis karena sikap kritisnya, yang satu mati dan yang lainnya dipenjara dalam benteng selama sepuluh tahun (Habermas, 2001: 72-73)

Politik dalam ruang publik era Orde Baru

Lain Eropa (Inggris, Jerman, Perancis), lain pula Indonesia. Ketiga negara ini adalah mantan penjajah, sementara Indonesia adalah negara yang pernah mengalami penjajahan. Sejarah berdirinya Indonesia sebagai sebuah negara dengan sistem politiknya yang demokratis boleh dikatakan masih sangat baru jika dibandingkan dengan tiga negara pertama tadi. Demokrasi kita masih belum lama tumbuh dibandingkan dengan Inggris, Jerman, dan Perancis yang telah memiliki akar dan tradisi budaya demokrasi yang sudah sekian lama.

Bagaimana melihat dan menjelaskannya? Kita akan meneliti praksis komunikasi dalam Ruang Publik yang terjadi di Indonesia pada masa Orde Baru dan Orde Reformasi.

Pertama, ruang publik yang dimaksud pada era Orde Baru adalah ruang publik bentukan mantan presiden Soeharto. Jadi setara atau mirip dengan model ruang publik istana yang terkait dengan otoritas raja pada abad 17 dan 18 di Eropa, dan tidak sama dengan ruang publik yang lahir dari kumpulan orang-orang yang berasal dari ruang privat sebagaimana menjadi inti dari pembahasan dalam buku Habermas. Ruang publik Orde Baru itu adalah Tapos. Dari taposlah mantan presiden Soeharto menyampaikan gagasan dan pemikirannya kepada masyarakat. Yang disampaikan bukan tentang politik, tetapi tentang masalah seputar pertanian dan peternakan (soal ikan lele dumbo, soal padi, soal pupuk, soal sapi, soal bikin kompos dari kotoran sapi, dst.) Tapos juga sekaligus menjadi tempat

pertemuan dan perbincangan (bukan diskusi, apalagi diskusi yang kritis) antara mantan Presiden Soeharto dengan para pejabat dan juga kelompok-kelompok masyarakat tertentu seperti petani dan sebagian pengusaha. Pembicaraan lebih cenderung bergerak atau mengarah pada monolog, dan bukan dialog kritis. Tapos sebagai ruang publik dimengerti lebih sebagai tempat *pamer kebesaran dan kesuksesan pak Harto sebagai bapak Pembangunan*. Jadi lebih mirip dengan model ruang publik istana raja pada abad 17 dan 18, ruang dimana raja dan para bangsawan istana sedang memamerkan kebangsawanan dan keningratannya. Tapos adalah ruang publik sebagai publikasi dan pengakuan dari masyarakat terhadap mantan Presiden Soeharto.

Peran media Televisi adalah melanjutkan dan menyebarluaskan pembicaraan di Tapos kepada khalayak masyarakat di seluruh Indonesia supaya bisa diketahui dan disimak, karena tapos itu hanya sebuah lokasi dan terikat oleh tempat yang terbatas. Fungsi TVRI adalah sebagai ruang publik (milik otoritas mantan Presiden Soeharto) untuk diseberluaskan bagi masyarakat.

Kedua, jika memperhatikan perbincangan politik dalam ruang publik borjuis pada abad 17 dan 18 di Eropa, ciri yang tampak menonjol adalah adanya kritik yang tajam. Dalam ruang publik era Orde Baru, kritik itu dianggap tabu, dan karena itu dilarang. Jadi ruang publik Orde Baru bukanlah ruang publik dalam arti sesungguhnya sebagaimana dimaksudkan oleh Habermas ketika dia mengacu pada situasi diskusi di kafe, kedai kopi, dan di dalam jurnal-jurnal pada abad 17 dan 18 di Eropa. Media di Indonesia pada masa Orde baru banyak yang bungkam, dan tidak berani mengambil posisi untuk mengkritik pemerintah.

Ketiga, adanya mekanisme pembredelan terhadap media atau pers pada masa Orde Baru, menjadi salah satu indikasi yang memperkuat pendapat serta penilaian bahwa ruang publik pada masa Orde Baru memang tidak berkembang, atau tidak ada. Kalau ada, maka ruang publik itu adalah hal yang semu. Pembredelan itu terkait dengan kritik. Karena ada mekanisme ini, maka kritik nyaris tidak ada pada masa Orde Baru. Yang ada adalah bentuk komunikasi berupa humor dan plesetan, namun itu pun dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

Politik dalam ruang publik era Reformasi

Setelah mantan Presiden Soeharto dilengserkan dari kekuasaannya, Indonesia memasuki sebuah masa yang dinilai sebagai masa paling demokratis, dan paling terbuka, tetapi sekaligus dianggap sebagai demokrasi yang kebablasan. Kebebasan menyatakan pendapat sebagai salah satu wujud demokrasi dimaknai sebagai hak untuk boleh berbicara tentang apa saja dan sesukanya saja tanpa harus memperhatikan kepentingan bersama sebagai sebuah bangsa. Praktek berdomokrasi yang dilakukan di jalanan oleh sebagian anggota masyarakat maupun berdebatan seru di ruang sidang anggota dewan di Senayang bisa menjelaskan hal yang dimaksud.

Belakangan ini marak terjadi demontarsi di Jakarta dan beberapa kota besar lain di Indonesia terkait dengan berbagai hal. Sikap para demonstran yang menolak atau mendukung sebuah kebijakan Pemerintah tidak lagi terjadi semata karena alasan demi kebaikan seluruh masyarakat tetapi karena ada pihak yang bersedia untuk membayar.

Ingar-bingar dan kegaduhan di jalan-jalan karena adanya aksi demonstrasi oleh sebagian anggota masyarakat ternyata dapat kita temukan juga di dalam ruang sidang para anggota dewan. Pada era Orde Baru, anggota dewan selalu mendapat *label 5 D*, yaitu *datang, duduk, diam, dengar, dan duit*. Pada era Reformasi, para anggota dewan yang terhormat ini tidak hanya datang, duduk, diam lalu mendengar tetapi mereka juga ingin didengar. Agar bisa didengar apa tuntutan dan aspirasinya, mereka harus berbicara bahkan dengan keras dan lantang dan kadang-kadang atau sering berebutan. Akibatnya suasana menjadi gaduh tidak hanya di dalam ruang sidang tetapi menembus ke luar dan menciptakan kegaduhan dalam kehidupan politik di tingkat Nasional. Mereka menjadi gaduh bukan karena seang memperjuangkan kepentingan masyarakat banyak tetapi sebaliknya sedang memperjuangkan kepentingan partainya atau koalisi partai yang mereka dukung.

Ingar-bingar dan kegaduhan akibat ruang kebebasan yang begitu luas untuk berkomunikasi pada era Reformasi ini juga terjadi dalam media komunikasi. Feneomena ini bermula dari SK menteri penerangan Yunus Yosfiah, pada masa itu, untuk melakukan

tindakan pencabutan terhadap mekanisme breidel. Banyak surat kabar dan majalah terbit, walaupun beberapa di antaranya tidak lama bertahan lalu mati. Diskusi politik dalam media cetak menjadi semakin terbuka. Hal yang sama juga terjadi dalam media elektronik. Diskusi dan perbincangan dalam berbagai televisi swasta tentang politik menjadi begitu marak. Banyak persoalan besar dan penting diangkat dalam layar televisi dan menjadi topik perbincangan yang seru. Jika pada masa Orde Baru tidak ada yang berani mengkritik pemerintah, maka pada masa reformasi ini banyak kritikan yang ditujukan kepada pemerintah baik terhadap presiden, para menteri, juga terhadap para pejabat lainnya seperti hakim, jaksa, polisi, dan anggota DPR RI.

Pertanyaannya, apakah ini pertanda bahwa ruang publik pada masa reformasi ini mengalami perkembangan yang lebih baik? Ternyata tidak juga. Artinya, tidak sepenuhnya ini menjadi pertanda perkembangan yang baik.

Perbincangan dan diskusi politik dalam media, misalnya soal korupsi—sesuatu yang terkait dengan kepentingan masyarakat luas—tidak sepenuhnya mencerminkan realitas ruang publik. Tiap kali sebuah stasiun televisi berbicara tentang korupsi dan dibahas berkali-kali (TV one, Metro TV) sesungguhnya terselip agenda terselubung dari partai tertentu, yaitu partai pemilik stasiun TV One dan Metro TV (Golkar dan Nasdem), untuk menjatuhkan partai lain (Demokrat) yang kebetulan anggotanya sedang terlibat dalam kasus korupsi. Jadi niat dalam perbincangan ini bukan pertama-tama tertuju pada kepentingan publik, atau dalam istilah yang disebut oleh Habermas *perasaan rakyat, suara bersama, tuntutan umum rakyat, atau roh publik* (Habermas, 2001: 66). Itu adalah suara dan kepentingan partai tertentu atau kelompok tertentu.

Contoh lain yang menarik diamati adalah acara diskusi tetap oleh kelompok yang menamakan dirinya *Indonesian Lawyers Club* di TV One. Banyak hal menarik yang dibicarakan. Ada diskusi, dan ada adu argumentasi tentang suatu topik menyangkut urusan politik. Namun para peserta yang kebanyakan adalah para Lawer, anggota DPR, dan masyarakat umum lainnya, sebetulnya baik secara tegas dan jelas maupun secara diam-diam, sudah mempunyai orientasi dan afiliasi politik dengan partai

tertentu. Jadi diskusi yang seru dan perbincangan tentang berbagai hal penting itu pada akhirnya tidak benar-benar tertuju pada kebaikan dan kepentingan bersama, namun terkait dengan kepentingan partai dan kekuasaan. Jadi ruang publik itu sebetulnya sudah dicerai oleh adanya kepentingan-kepentingan terselubung yang sifatnya tidak lagi publik, untuk kebaikan semua, tetapi sempit dan parokial.

Politik dalam ruang publik era digital

Mereka yang optimistis mengenai meledaknya media baru akan berpendapat, internet mengembalikan ruang publik ke tangan rakyat—dalam hal ini diwakili oleh kelas menengah pemilik komputer dan punya akses ke ruang maya. Berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), jumlah pengguna internet di Indonesia tahun 2012 mencapai 63 juta orang atau 24,23 persen dari total populasi negara ini. APJII juga memprediksikan jumlah ini akan naik hingga 139 juta pada tahun 2015. Nugraha (2013) menyebut anggota blog warga Kompasiana yang rata-rata terdaftar sebagai penulis sudah mencapai angka 170.000 dengan arus hingga 1.000 artikel per hari.

Arti ‘khalayak’ kini tak lagi sama. Khalayak bukan lagi sekumpulan orang yang duduk manis menikmati konten media dan hanya menyimpan komentar atau gagasan mereka di dalam hati. Jika dulu pembaca yang tak setuju dengan isi berita di surat kabar hanya dapat mengirim surat pembaca dan menunggu surat mereka dimuat, kini mereka bisa berkomentar langsung di bagian ‘comment’ portal situs berita. Komentar itu memancing komentar lain, begitu seterusnya sehingga mungkin rangkaian komentar itu saja sudah bisa menjadi berita tersendiri.

Permasalahan utama media “tradisional” seperti televisi, koran, majalah dan radio, adalah khalayak cenderung menerima informasi dan hiburan secara pasif, alih-alih memberikan reaksi berupa komentar atau gagasan. Media tradisional tidak memberikan kesempatan bagi khalayak untuk memikirkan dengan sungguh-sungguh konten media yang mereka konsumsi, dan walaupun ya, khalayak juga tidak diberi ruang untuk mengekspresikan ide dan gagasannya itu secara sistematis dan

berkelanjutan.

Media baru memiliki potensi untuk mengisi kekosongan ini. Perhatikan bagaimana konten berita daring (dalam jaringan) menyertakan ruang untuk komentar pembaca. Ini berarti ada kebutuhan masyarakat untuk bicara, mengkritisi, didengar dan mendengar. Warga bukan lagi sekelompok individu anonim yang menerima begitu saja konten media tanpa bersikap kritis.

Sampai di sini, internet tampak sebagai ruang ideal bagi khalayak. Tak hanya dalam memantau kinerja media, tapi juga memberikan opini, menyumbangkan gagasan, dan segenap aktivitas lain terkait pergulatan wacana. Bermodalkan seperangkat komputer dan akses internet, siapapun bisa ikut mengomentari isu-isu yang menjadi persoalan bersama dalam masyarakat. Tetapi, benarkah selalu demikian? Dalam tulisannya mengenai ruang publik dunia maya, Karlina Supelli dalam F. Budi Hardiman (ed., 2010) berpendapat, perkembangan teknologi informasi memang berhasil melipatgandakan ruang diskusi warga. Tapi, sejauh ruang-ruang maya tersebut terisi dengan celetukan remeh, rasa ingin tahu yang malas, dan opini tanpa komitmen, menyebut dunia maya sebagai ruang publik lebih merupakan cita-cita daripada fakta.

Ambil contoh peristiwa kerusuhan Distrik Karubaga, Tolikara, Papua, pada perayaan Idul Fitri Juli lalu. Satu minggu setelah insiden, beredar pesan teks tentang rencana ‘aksi lanjutan’ berupa pengerahan massa di masjid Kota Barat, Surakarta. Sejumlah artikel di website yang mengaitkan insiden Tolikara dengan kampanye hitam terhadap agama tertentu, juga laris disebar di media sosial. Hari itu tak terjadi apa-apa di Solo. Mudah saja menyadari pesan berantai dan aneka informasi di situs itu tak lebih dari ‘tes ombak’ para oknum yang ingin membuat kekacauan. Pertanyaannya: mengapa begitu mudah bagi kita menyebarkan sesuatu yang tidak jelas sumber beritanya?

Sejak media sosial naik daun, prinsip jurnalistik 5W+1H tak lagi laku. Orang menelan informasi tanpa sikap skeptis, yang sebenarnya justru diperlukan. Bahkan, ada semacam logika terbalik: tulisan yang diposting oleh anonim atau pseudonim, dianggap pasti berisi kebenaran. Seolah penulisnya ‘terpaksa’ menyamarkan identitas karena keberaniannya mengungkapkan fakta-fakta itu membahayakan nyawa.

Bayangkan hal ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak tak bertanggungjawab untuk menebar isu dan fitnah. Memang, media sosial memungkinkan penyebaran informasi dan gagasan alternatif yang tak tertampung oleh media konvensional. Di sisi lain, coba lihat akun-akun anonim dan pseudonim di Twitter, Facebook, dan blog warga seperti Kompasiana. Jumlah mereka banyak, dan amat aktif menyebar fiksi yang bahkan lebih seru dari novel-novel misteri.

Internet, yang seharusnya bisa jadi ruang mengemukakan gagasan—artinya sesuai cita-cita ruang publik menurut definisi Habermas—bisa menjelma menjadi ajang fitnah tanpa ampun. Atas nama “boleh anonim”, orang dapat menyebarkan hinaan paling keji, cacian paling rasis, sampai cerita bohong yang terkonstruksi begitu rapi, sehingga diterima sebagai seolah-olah benar. Parahnya lagi, justru postingan penuh *hate speech* ini yang sering dirujuk dan dikutip dalam perbincangan mengenai isu publik di ruang-ruang media sosial. Praktik semacam ini akan menjadi kontraproduktif terhadap upaya demokratisasi dan deliberasi dalam kehidupan publik. Jika diteruskan, pada akhirnya media sosial akan rawan dijadikan tempat agenda-setting oleh pihak-pihak yang memiliki akses pada uang dan kekuasaan.

Di sisi lain, sebetulnya media sosial jelas punya potensi menjadi ruang memperbincangkan isu-isu publik. Paralel dengan koran *Morning Chronicle* yang memuat semua isi pidato Parlemen di Inggris pada abad 17, sekarang pun kita bisa mengikuti reportase *livetweet* sidang DPR melalui akun Twitter @wikiDPR. Gerakan ini dimulai dari inisiatif warga, berjalan dengan merangkul relawan dan mahasiswa magang. Bayangkan bahwa rapat atau sidang yang dulu tertutup itu, kini bisa diikuti dengan bebas dan terbuka. Contoh lain adalah para kepala daerah banyak merekam rapat dan mengunggahnya ke media sosial agar masyarakat tahu apa yang sebenarnya dibahas. Perhatikan pula bagaimana saat pilpres 2014 lalu, bermunculan banyak sekali situs dan aplikasi yang tujuannya mengawal hasil penghitungan suara.

Fungsi politik ruang publik di era digital ini memang bagaikan dua sisi mata uang. Tidak semua perbincangan di internet mengenai kepentingan umum, diungkapkan secara serius dan merepresentasikan keinginan untuk

berpartisipasi dalam kehidupan bernegara; banyak di antaranya yang asal-asalan, rasis, dan seksis. Ketika keran berpendapat terbuka lebar, yang muncul ke permukaan tentu saja bukan hanya pendapat yang cerdas dan berintegritas, tapi juga pendapat yang sekenanya, atau malah cenderung destruktif.

PENUTUP

Pertama, ruang publik yang berkembang di Eropa yang dimaksudkan oleh Habermas adalah ruang publik sebagai hasil bentukan dari kumpulan orang-orang yang ada dalam ruang privat.

Kedua, perbincangan dan diskusi dalam ruang publik ini ditandai dengan keterbukaan dan kritik-kritik yang tajam. Hubungan antara orang-orang dalam ruang publik ini ditandai dengan kesetaraan, tanpa sekat-sekat karena faktor perbedaan status keningratan atau kebangsawanan.

Ketiga, keberlangsungan dan eksistensi dari berbagai aktivitas diskusi dalam ruang publik ini juga didukung oleh kehadiran media cetak berupa jurnal-jurnal dan surat kabar yang berisi kolom tentang topik-topik yang menjadi bahan diskusi seperti politik, seni, dan sastra.

Keempat, faktor yang ikut mendukung pertumbuhan dan perkembangan ruang publik yang terjadi di Eropa pada abad 17 dan 18 adalah ikatan primordial yang terkait dengan kebangsawanan dan keningratan yang mulai longgar. Semakin orang melekatkan diri pada status sosialnya, maka forum bagi terbentuknya ruang publik menjadi lebih sulit. Itu yang membedakan antara suasana dan dinamika ruang publik yang terjadi di Inggris dengan di Perancis dan Jerman.

Kelima, ruang publik di Indonesia belum bisa berkembang maksimal karena faktor kekuasaan yang otoriter pada masa Orde Baru yang memberlakukan mekanisme pembredelan dan mentabukan kritik, dan juga karena faktor ikatan yang masih didasarkan pada kepentingan kelompok partai atau golongan, dan bukan kepentingan publik dalam arti kata yang sebenarnya dalam setiap acara diskusi pada forum-forum publik (Orde Reformasi).

Keenam, anggapan bahwa internet adalah ruang publik baru, belum dapat dikatakan sah. Memang ada upaya untuk mendiskusikan kepentingan umum melalui media baru, tetapi berita bohong dan fitnah juga beredar dengan mudah. Masyarakat Indonesia masih jauh dari sikap dewasa dalam berpolitik di era digital.

REFERENSI

Briggs, Asa and Peter Burke. *A Social History of The Media From Gutenberg To the Internet*. Cambridge: Polity Press. 2002.

Clifford, Stacy, *Disabling Democracy: How Disability Reconfigures Deliberative Democratic Norms*, Toronto: APSA Meeting Paper. 2009.

Habermas, Jürgen, *The Structural Transformation of the Public Sphere*, terjemahan oleh Thomas Burger, US: MIT Press. 2001.